

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Peranan

Pengertian peranan menurut Soekanto (2002: 268-269), merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.

Menurut Soekanto (2002: 441), unsur-unsur peranan atau role adalah:

- 1) Aspek dinamis dari kedudukan
- 2) Perangkat hak-hak dan kewajiban
- 3) Perilaku sosial dari pemegang kedudukan
- 4) Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang

Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Sementara peranan itu sendiri diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Menurut Komarudin (1994), yang dimaksud peranan yaitu :

- 1) Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen
- 2) Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status
- 3) Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata
- 4) Fungsi yang diharapkan dari seseorang tu menjadi karakteristik yang ada padanya
- 5) Fungsi setiap variable dalam hubungan sebab akibat

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa peranan adalah penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 (dua) variable yang mempunyai hubungan sebab akibat.

B. Kepemimpinan

Menurut Kartono (2010: 6), Kepemimpinan adalah masalah relasi dan pengaruh antara pemimpin dan yang dipimpin. Kepemimpinan tersebut muncul dan berkembang sebagai hasil dari interaksi otomatis di antara pemimpin dan individu-individu yang dipimpin (ada relasi interpersonal). Kepemimpinan ini bisa berfungsi atas kekuasaan pemimpin untuk mengajak, mempengaruhi, dan menggerakkan orang-orang lain guna melakukan sesuatu , demi pencapaian satu tujuan tertentu. Sedangkan menurut Robbins (2006), menyatakan kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi kelompok menuju pencapaian sasaran.

Menurut Rivai dan Mulyadi (2013: 2), Kepemimpinan dipahami sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan memengaruhi orang lain. Kepemimpinan sebagai sebuah alat, sarana atau proses untuk membujuk orang agar bersedia melakukan sesuatu secara sukarela. Beberapa faktor yang dapat menggerakkan orang yaitu karena ancaman, penghargaan, otoritas, dan bujukan. Kepemimpinan juga dikatakan sebagai proses menggerakkan dan memengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok. Implikasi yang terkandung dalam hal tersebut yaitu :

- 1) Kepemimpinan itu melibatkan orang lain baik itu bawahan maupun pengikut
- 2) Kepemimpinan melibatkan pendistribusian kekuasaan antara pemimpin dan anggota kelompok secara seimbang, karena anggota kelompok bukanlah tanpa daya
- 3) Adanya kemauan untuk menggunakan bentuk kekuasaan yang berbeda untuk mempengaruhi tingkah laku pengikutnya melalui berbagai cara

1. Pendekatan atau Teori Kepemimpinan

Dalam mengembangkan model kepemimpinan terdapat beberapa teori yang mendasari terbentuknya gaya kepemimpinan. Menurut Rivai dan Mulyadi (2013: 7-9) ada empat macam pendekatan kepemimpinan yaitu :

a. Teori Sifat

Teori sifat terdiri dari sifat intelegensi, kepribadian dan karakteristik fisik. Teori ini berusaha untuk mengidentifikasi karakteristik khas (fisik, mental, kepribadian) yang dikaitkan dengan keberhasilan kepemimpinan dan menekankan pada atribut-atribut pribadi dari para pemimpin. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa beberapa orang

merupakan pemimpin alamiah dan dianugrahi beberapa ciri yang tidak dimiliki orang lain seperti energi yang tidak habis-habisnya, intuisi yang mendalam, pandangan masa depan yang luar biasa dan kekuatan persuasif yang tidak tertahankan.

b. Teori Kepribadian Prilaku

Di akhir tahun 1940-an para peneliti mulai mengeksplorasi pemikiran bahwa bagaimana perilaku seseorang dapat menentukan keefektifan kepemimpinan seseorang, dan menemukan sifat-sifat, meneliti pengurusnya pada prestasi dan kepuasan dari pengikut-pengikutnya.

c. Teori Kepemimpinan Situasional

Teori ini mengasumsi bahwa kepemimpinan memahami perilakunya, sifat-sifat bawahannya, dan situasi sebelum menggunakan suatu gaya kepemimpinan tertentu. Pendekatan ini mensyaratkan pemimpin untuk memiliki keterampilan diagnostik dalam perilaku manusia.

d. Pendekatan Terbaru dalam Kepemimpinan

Mengenai teori kepemimpinan yaitu dengan menyajikan tiga pendekatan lebih baru terhadap persoalan :

1) Teori Atribusi Kepemimpinan

Teori ini mengemukakan bahwa kepemimpinan semata-mata suatu atribusi yang dibuat orang mengenai individu-individu lain

2) Teori Kepemimpinan Karismatik

Teori ini mengemukakan bahwa para pengikut membuat atribusi dari kemampuan kepemimpinan yang heroic atau luar biasa bila mereka mengamati perilaku-perilaku tertentu.

3) Teori Kepemimpinan Transaksional Lawan Transformasional

Pemimpin transaksional, pemimpin yang memandu atau memotivasi pengikut mereka dalam arah tujuan yang ditegaskan dengan memperjelas peran dan tuntutan tugas. Sedangkan pemimpin transformasional, pemimpin yang memberikan pertimbangan dan rangsangan intelektual yang diindividuikan, dan yang memiliki karisma.

2. Pimpinan Formal dan Pimpinan Informal

Menurut Rivai dan Mulyadi (2013: 3), kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan. Sumber pengaruh dapat secara formal atau tidak formal. Pengaruh formal ada bila seseorang pemimpin memiliki posisi manajerial di dalam sebuah organisasi. Sedangkan sumber pengaruh tidak formal muncul di luar struktur organisasi formal. Dengan demikian, seorang pemimpin dapat muncul dari dalam organisasi atau karena ditunjuk secara formal. Pengaruh pemimpin dapat ditentukan oleh statusnya yaitu sebagai pimpinan formal atau pimpinan informal.

Pimpinn formal yaitu lembaga eksekutif, legislative, dan yudikatif artinya seseorang yang ditunjuk sebagai pemimpin, atas dasar keputusan dan pengangkatan resmi untuk memangku suatu jabatan dalam struktur

organisasi dengan segala hak dan kewajiban yang melekat berkaitan dengan posisinya seperti:

- Memiliki dasar legalitasnya diperoleh dari penunjukan pihak yang berwenang
- Harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu
- Mendapat dukungan dari organisasi formal ataupun atasannya
- Memperoleh balas jasa/kompensasi baik materiil atau immaterial tertentu
- Kemungkinan mendapat peluang untuk promosi, kenaikan pangkat/jabatan, dapat dimutasikan, diberhentikan dan lain-lain
- Mendapatkan *reward* dan *punishment*
- Memiliki kekuasaan atau wewenang

Pimpinan informal yaitu tokoh masyarakat, pemuka agama, adat, LSM, guru, bisnis, dan lain-lain artinya seseorang yang ditunjuk memimpin secara tidak formal, karena memiliki kualitas unggul, dia mencapai kedudukan sebagai seorang yang mampu memengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok/ komunitas tertentu, seperti :

- Sebagian tidak/belum memiliki acuan formal atau legitimasi sebagai pimpinan
- Masa kepemimpinannya, sangat tergantung pada pengakuan dari kelompok atau komunitasnya
- Tidak di *back up* dari organisasi secara formal
- Tidak mendapatkan imbalan/kompensasi

- Tidak mendapat promosi, kenaikan pangkat, mutasi, dan tidak memiliki atasan
- Tidak ada *reward* dan *punishment*

a. Kepemimpinan Pemerintahan Adat

Menurut Soepomo (1979: 75), kepemimpinan adat merupakan kepemimpinan lokal dalam masyarakat, yang mengetahui persekutuan sebagai ketua suatu keluarga besar, dia adalah pemimpin pergaulan hidup dalam persekutuan.

Seseorang diartikan sama antara pemimpin dan kepemimpinan, padahal macam pengertian tersebut berbeda. Pemimpin kedua adalah seorang yang tugasnya memimpin, sedangkan kepemimpinan adalah bakat dan atau sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin. Setiap orang mempunyai pengaruh atas pihak lain, dengan latihan dan peningkatan pengetahuan oleh pihak maka pengaruh tersebut akan bertambah dan berkembang. Kepemimpinan membutuhkan penggunaan kemampuan secara aktif untuk mempengaruhi pihak lain dan dalam mewujudkan tujuan organisasi yang telah ditetapkan lebih dahulu. Dewasa ini kebanyakan para ahli beranggapan bahwa setiap orang dapat mengembangkan bakat kepemimpinannya dalam tingkat tertentu.

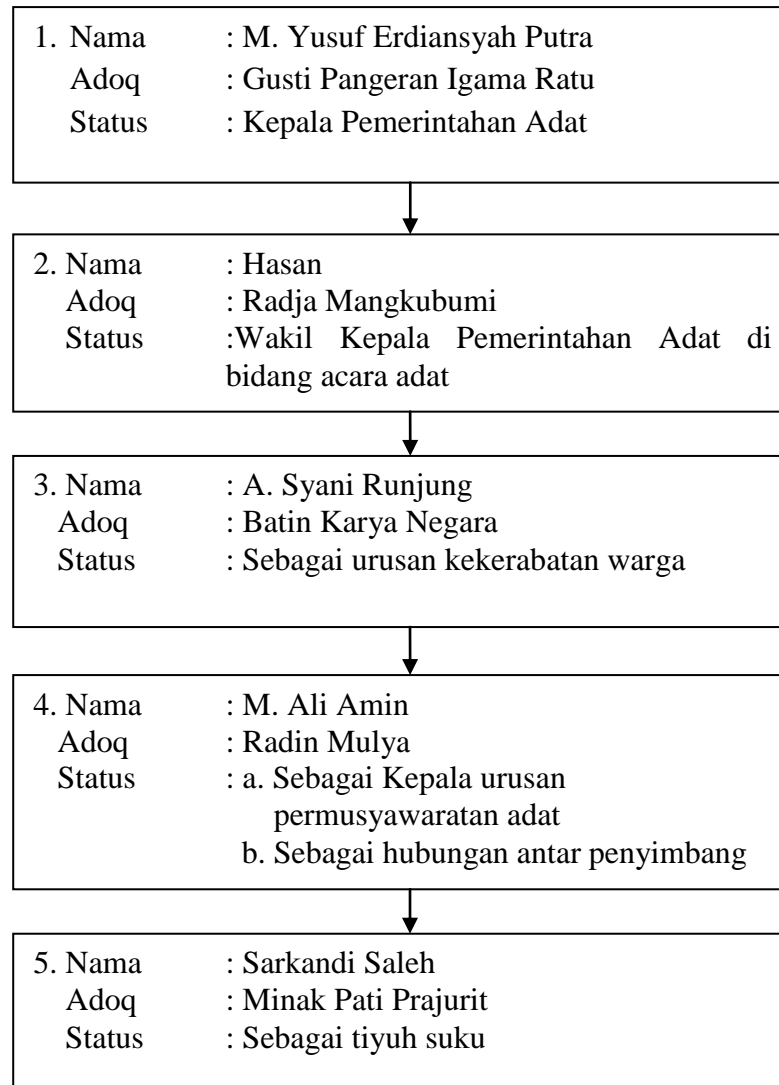
Menurut Ndraha (2011: 216), kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain melalui dirinya sendiri dengan cara tertentu sehingga perilaku orang lain itu berubah atau tetap, menjadi

integrative. Dalam situasi integrative itu, seseorang menjadi akseptabel bagi orang lain, *wanes* terbentuk.

Menurut Diandra (2013) mengatakan bahwa, Pemerintahan Adat Lampung pada awalnya dipimpin oleh seorang Saibatin yang berarti satu pimpinan atau seorang penguasa. Dalam sistem pemerintahan adat Lampung dikenal berjenjang berdasarkan hirarki seseorang di dalam adat, hirarki seseorang didalam adat juga menentukan panggilan kekeluargaan/panggilan kekerabatan seseorang. Ada tiga pilar yang menyokong sistem pemerintahan adat Lampung yaitu Saibatin yang merupakan pemimpin adat tertinggi, penyimbang yang merupakan perwakilan dari Saibatin dan himpunan atau musyawarah adat. Hirarki adat dalam Struktur Pemerintahan Adat Lampung Saibatin adalah berdasarkan Adoq atau Gelar seseorang didalam Adat, masing-masing adalah:

1. Suttan/Pangiran/Dalom
2. Raja/Depati
3. Batin
4. Radin
5. Minak/Kimas/Mas Itton

Struktur Pemerintahan Adat Kebandaran Marga Balak



Gambar 2.1 Struktur Pemerintahan Adat

Struktur pemerintahan pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin adalah sistem pemerintahan jurai berdasarkan kekerabatan dan bukan sistem pemerintahan wangsa ala Raja dan Kawula seperti di Jawa. Struktur pemerintahan adat pada masyarakat adat Lampung Saibatin dilaksanakan dengan struktur pemerintahan kekerabatan sebagai berikut :

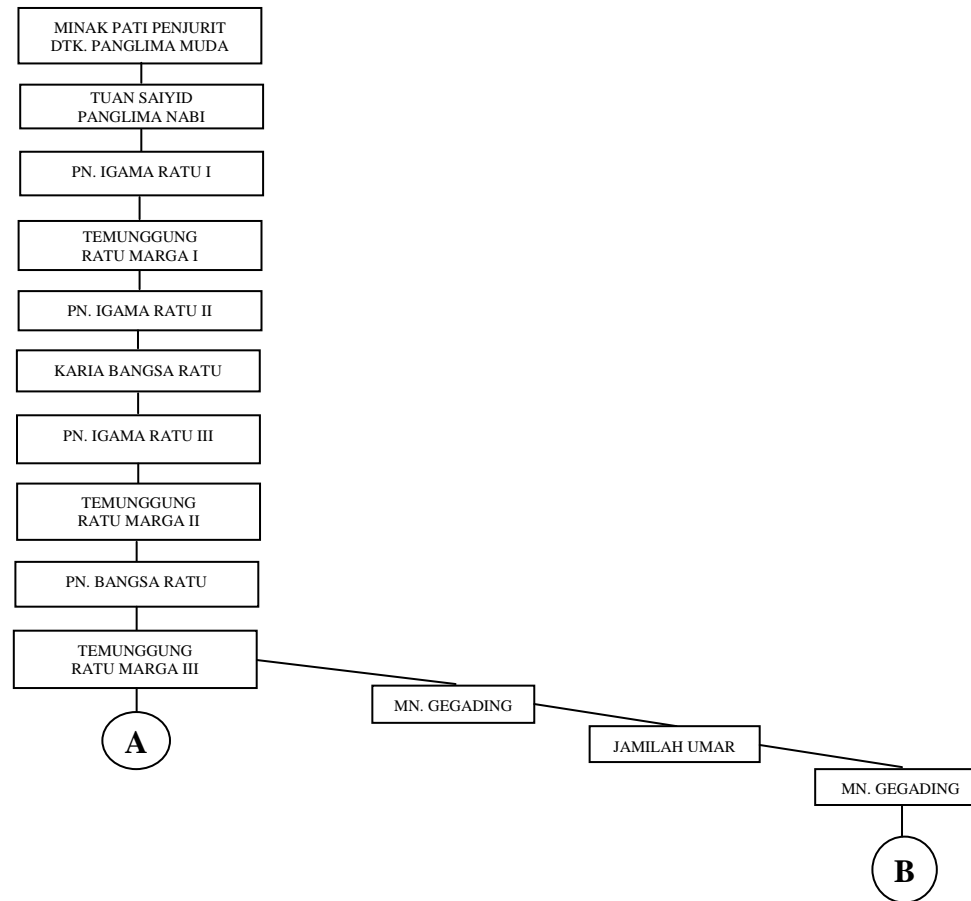
1. Institusi pemerintahan adat yang tertinggi adalah paksi/buway/marga yang merupakan himpunan dari suku/jukku. Institusi ini dipimpin oleh anak pria tertua dari keturunan yang tertua diantara mereka. Beliau ini memiliki adoq Suttan/Pangiran/Dalom. Panggilan adat kepada beliau adalah bapak dalam;
2. Institusi sukku/jukku adalah himpunan dari Sumbai. Institusi ini dipimpin oleh anak pria tertua dari keturunan yang tertua diantara mereka. Beliau ini memiliki adoq Raja/Depati. Panggilan adat kepada beliau adalah bapak batin;
3. Institusi sumbai adalah himpunan dari kepu/kebu. Institusi ini dipimpin oleh anak pria tertua dari keturunan yang tertua diantara mereka. Beliau memiliki adoq batin. Panggilan adat kepada beliau adalah bapak balak;
4. Institusi kepu/kebu adalah himpunan dari beberapa lamban. Institusi ini dipimpin oleh anak pria tertua dari keturunan yang tertua diantara mereka. Beliau ini memiliki adoq radin. Panggilan adat kepada beliau adalah bapak tengah;
5. Institusi adat yang paling bawah disebut lamban. Institusi ini dipimpin oleh seseorang yang disebut khagah. Beliau ini memiliki adoq minak, kimas, mas/itton. Panggilan adat beliau adalah bapak lunak atau pak cik.

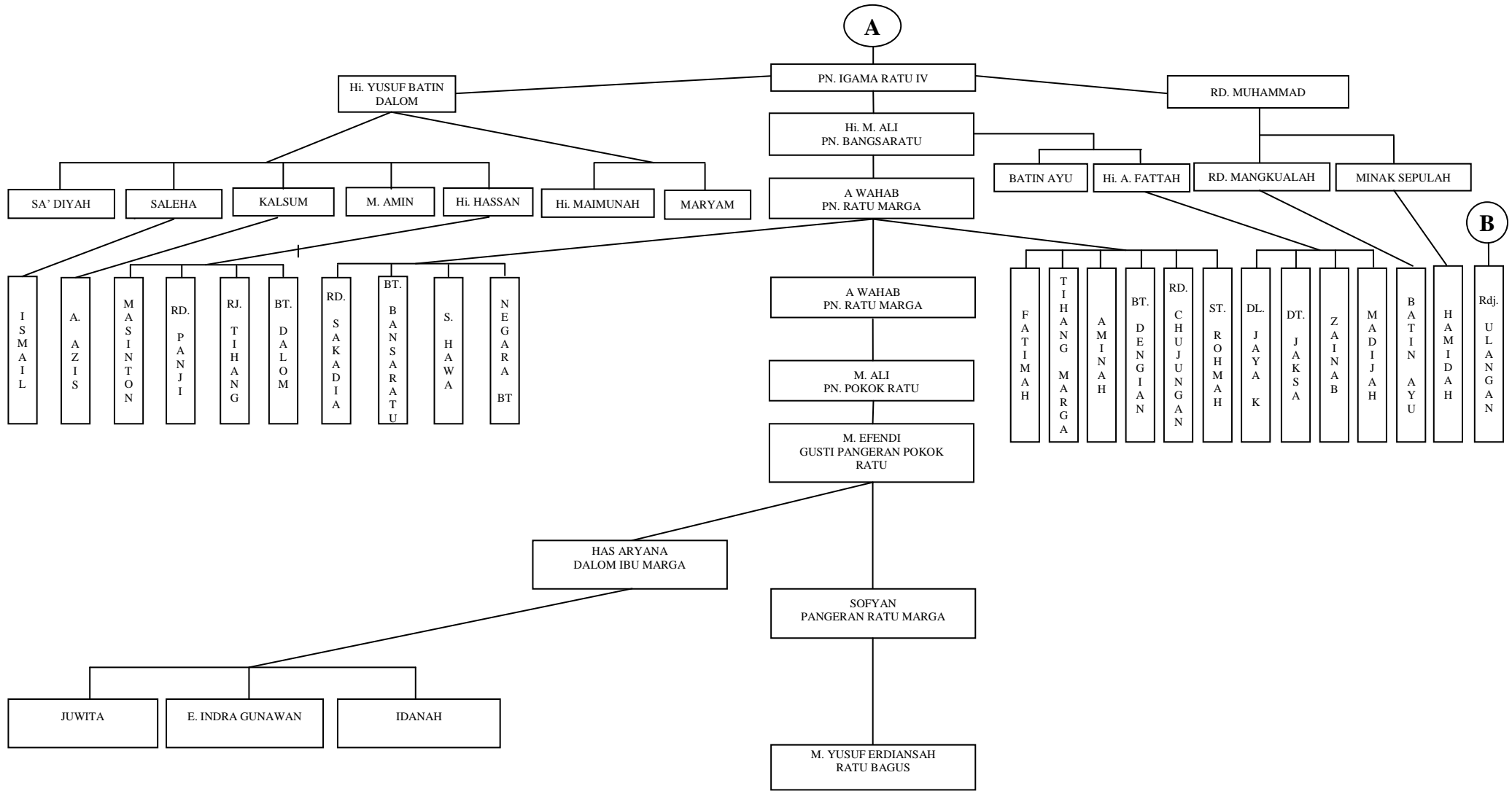
Dengan demikian seseorang yang memiliki adoq Suttan/Pangiran/Dalom salah satu syaratnya adalah dia telah memiliki Jamma (Bawahan/Marga/Anak Buah) setidaknya 4 orang yang beradoq Raja. Demikian juga seorang yang memiliki adoq Raja/Depati syaratnya adalah dia telah memiliki Jamma setidaknya empat orang yang beradoq Batin. Seorang yang memiliki adoq Batin syaratnya adalah dia telah memiliki Jamma setidaknya empat orang yang bergelar Radin. Seseorang yang memiliki adoq Radin syaratnya adalah dia telah memiliki Jamma setidaknya empat orang yang beradoq Minak, Kimas, dan Mas/Itton. Sementara masing-masing Minak, Kimas, Mas/Itton memimpin institusi keluarga atau lamban. Panggilan kekerabatan disesuaikan dengan tingkatan hirarki seseorang didalam adat, beberapa panggilan adat mungkin agak berbeda disetiap Buwaynya.

Dapat di lihat di bawah ini Silsilah Kepala Pemerintahan Adat sesuai garis keturunan pada tahun 1996 di Lamban Dalom Kebandaran Marga Balak Lampung Pesisir (Saibatin) di Kelurahan Negeri Olok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung.

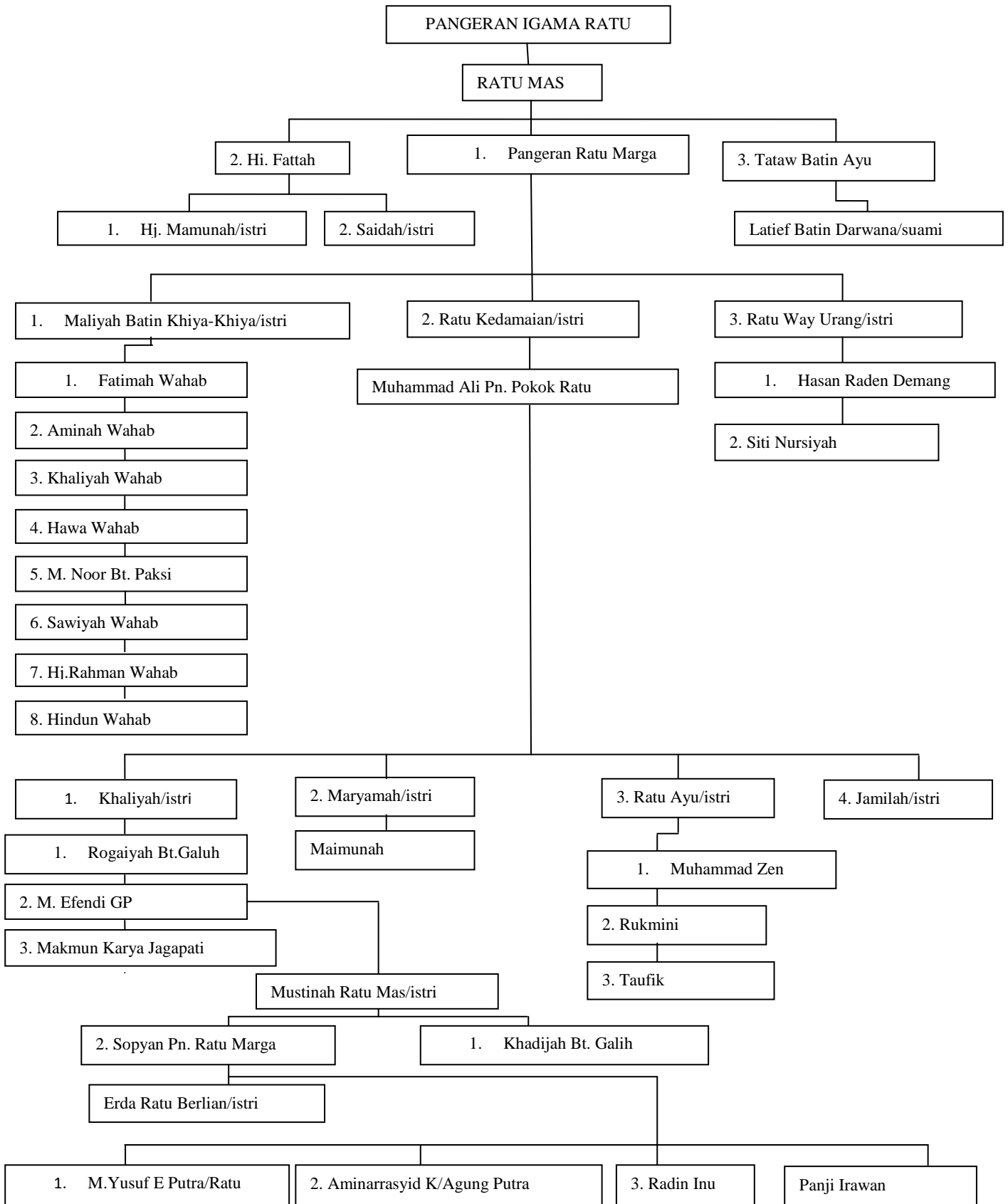
STAMBOOM BUAI RUNJUNG

STAAT MENYATAKAN TURUNAN BANDAR MARGA BALAK ASAL MULA TURUN DARI PAGAR RUYUNG





Gambar 2.2 Silsilah Kepala Pemerintahan Adat



Gambar 2.3 Silsilah Kepala Pemerintahan Adat tahun 1996

b. Ruang Lingkup Urusan Adat Lampung Saibatin

Menurut Subaruddin (2012), ruang lingkup urusan adat Lampung Saibatin yaitu :

1. Kesenian meliputi :
 - a. Seni tari terdiri dari tari adat, tari hiburan, dan tari pergaulan
 - b. Seni suara terdiri dari wawancan, talibun, sakiman, saganing (teteduhan), sasikun (pribahasa), bandung (bubandung), papancokh (patcukh), sagata, adi-adi, tatundin, dan hahiwang

2. Sistem perkawinan

Sistem perkawinan dalam masyarakat Lampung Saibatin pada umumnya, yaitu :

- a. Kawin Secara adat
 - 1) Cakha Ngakuk (ngambil gadis – secara terang) tata cara perkawinan ini dilakukan dengan baik-baik antara kedua belah pihak, maupun punyimbang masing-masing, sepakat untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku tanpa ada masalah sebelumnya.
 - 2) Cakha Sebambangan (berlarian), proses ini dilakukan atas kesepakatan antara bujang gadis yang saling bercinta akibat dari berbagai hambatan yang menghalangi kelancaran hubungan mereka.

- b. Cakha Semanda (Mengambil laki-laki)

Ada beberapa macam semanda yang berlaku yaitu :

- 1) Semanda Cambokh Sumbai/ Mati Manuk Mati Tunggu, Semanda ini adalah bentuk Semanda yang asli karena silelaki sepenuhnya tunduk kepada pihak perempuan
- 2) Semanda Ngebabang (Mengasuh) semanda ini diberlakukan untuk sementara karena si istri mempunyai adik yang masih kecil. Apabila adiknya telah berkeluarga, maka mereka baru bisa keluar dari lingkungan keluarga pihak perempuan untuk mencari tempat lain atau lelaki baik kepada keluarganya
- 3) Semanda Ikhing Beli
Terjadinya semanda ini karena ketika kewajiban untuk membayar jajokh/ mas kawin silelaki belum bisa melunasinya, sebelum jajokh itu lunas maka silelaki harus ikut perempuan
- 4) Semanda Sai Iwa Khua Penyesuk/ Semanda Tunggang Petawok
Dalam hal ini kedua belah pihak/suami istri bisa mengikuti adat istiadat masing-masing tanpa kehilangan haknya, tetapi silelaki tetap tinggal atau mengikuti pihak perempuan
- 5) Semanda Anak Dagang/ Semanda Bukhung
Semanda ini diandaikan dengan seekor burung, dimana ia bertengger disitulah ia mencari makan. Maka keluarga merek suami/istri) bebas untuk tinggal dimana saja, baik ikut pihak laki-laki atau perempuan
- 6) Semanda Khaja-Khaja
Semanda ini jrng sekali terjadi tetapi da. Menurut ketentuan anak laki-laki tertua atau anak punyimbang/ saibatin tidak boleh semanda. Tetapi karena telah jodoh maka ini harus terjadi. Umpamanya karena

gadis adalah anak semata wayang (anak satu-satunya). Sehingga ia mau tidak mau harus mengambil laki-laki, karena ada tarik menarik antara kedua belah pihak, mereka dikawinkan dengan ketentuan mereka boleh menggunakan adat istiadat masing-masing

7) Semanda Diucuk

Terjadi karena adanya masalah dalam keluarga setelah beberapa lama mereka berkeluarga

8) Semanda Geduk

Dalam hal ini semanda ini selalaki sama sekali tidak bertanggung jawab dengan keluarga istri

9) Semanda Ngijam Jaguk

Sesungguhnya jenis semanda ini tidak berlaku pada masyarakat saibatin dan banyak terjadi pada masyarakat pepadun

c. Kawin Secara Lari

Kawin seperti ini berbeda dengan kawin sebambangan/berlarian. Kalau sebambangan terjadinya perkawinan memang dibolehkan atau diatur oleh adat istiadat, tetapi kawin lari justru keluar dari adat dengan sama sekali tidak melibatkan aturan yang ditetapkan oleh adat

d. Kawin Secara Berlarian/Sebambangan

Perbuatan ini dilakukan oleh sepasang remaja yang merasa tidak dapat dipisahkan lagi dan mereka merasa ada hambatan dalam hubungan mereka, maka sepakat untuk melakukan berlarian

e. Perhelatan Dikalangan Saibatin

Perhelatan untuk perkawinan dan khitanan, juga dilakukan penobatan turun naiknya tahta atau penyerahan gelar/ cakak adoq yaitu upacara pemberian gelar kepada pengantin laki-laki khususnya, apabila ia adalah anak laki-laki tertua. Dengan demikian pucuk pimpinan tertinggi dari punyimbang telah beralih padanya. Dalam perhelatan, pakaian yang dipakai oleh orang tua yang terlibat dalam kegiatan pesta tersebut menunjukkan status pemakainya.

1) Pria :

- a) Kain sarung berlipat sampai pinggul atau lipat samping, menunjukkan bahwa pemakainya masih bujang
- b) Kain sarung berlipat sampai paha atau lipat tengah, menunjukkan bahwa sipemakainya telah berkeluarga/kawin
- c) Kain sarung yang berlipat sampai lutut, sipemakainya sudah berkeluarga dan telah mempunyai anak
- d) Kain sarung berlipat sampai mata kaki, menandakan sipemakainya orang tua yang telah beranak cucu

2) Wanita :

- a) Selendang dipakai secara bersilang kiri-kanan, menandakan sipemakainya masih gadis atau perawan
- b) Selendang disampirkan dileher dengan kedua ujungnya terurai lepas didepan, sipemakainya sudah kawin

- c) Selendang dililitkn diatas kepala tetapi ujungnya terlepas berarti sipemakainya perempuan setengah tua (telah berkeluarga dan beranak)
- d) Selendang dililitkan dikepala dan diikatkan, sipemakainya adalah orang tua yang telah beranak cucu

C. Kepala Pemerintahan Adat

1. Pengertian Kepala Adat

Menurut Asy'arie (2005: 85) mengemukakan bahwa Kepala Adat adalah seorang pemimpin yang benar-benar memimpin masyarakat dengan berpegang pada adat dan aturan yang sebenarnya, tidak memihak saat bertindak menjadi penengah dalam suatu perkara dan tidak berat sebelah dalam suatu keputusan, kedudukan kepala adat sangat strategis, karena kepala adat menjalankan hak, wewenang dan adat istiadat yang merupakan penyelenggaraan tanggung jawab dalam pembangunan dan kemasyarakatan.

Sedangkan menurut Soepomo (1979: 57), pengertian kepala adat adalah sebagai berikut “Kepala adat adalah bapak masyarakat, dia mengetahui persekutuan sebagai ketua suatu keluarga besar, dia adalah pemimpin pergaulan hidup dalam persekutuan”

Dengan demikian kepala adat bertugas memelihara hukum hidup didalam persekutuan, menjaga, supaya hukum itu dapat berjalan dengan selayaknya. Aktivits kepala adat sehari-hari meliputi seluruh lapangan masyarakat. Tidak ada satu lapangan pergaulan hidup di dalam badan

persekutuan yang tertutup bagi Kepala Adat untuk ikut campur bilamana diperlukan untuk memelihara ketentraman, perdamaian, keseimbangan lahir batin untuk menegakkan hukum.

Menurut Soepomo (1979) Adapun aktivitas Kepala Pemerintahan Adat dapat di bagi dalam 3 bagian yaitu :

- a. Tindakan mengenai urusan tanah berhubung dengan adanya pertalian erat antara tanah persekutuan (golongan manusia) yang menguasai tanah itu
- b. Penyelesaian hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran hukum (*Preventieve Rechtszorg*) supaya hukum dapat berjalan semestinya.
- c. Menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan hukum, setelah hukum itu dilanggar (*Repressive Rechtszorg*).

Dengan demikian Kepala Adat di dalam segala tindakannya dan dalam memegang adat itu memperhatikan perubahan-perubahan. Adanya pertumbuhan hukum sehingga dibawah pimpinan dan pengawasan Kepala Adat yang sangat penting adalah pekerjaan di lapangan atau sebagai hakim perdamaian desa. Apabila ada perselisihan atau perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat, maka kepala adat bertindak untuk memulihkan perdamaian adat, memulihkan keseimbangan di dalam suasana desa serta memulihkan hukum.

Menurut Kusumah (1980: 66), di beberapa daerah di Indonesia istilah Kepala Adat ada bermacam-macam menyebutkannya. Di Minangkabau Kepala Adat disebut penghulu istilah penghulu diartikan sebagai orang yang dituakan dalam suatu kerabat atau suku yang bertalian dengan hubungan darah maupun adat. Penghulu dalam masyarakat Minangkabau mempunyai tugas rangkap yaitu disebut sebagai Kepala Adat, dipihak lain ia bertugas sebagai pelaksana pemerintahan desa. Karena itu penghulu dengan kepala desa dapat dijabat oleh satu orang saja. Dengan demikian antar kedua jabatan tersebut tidak dapat dipisahkan, walaupun mempunyai tugas yang berbeda.

Di Jawa istilah Kepala Adat dipegang oleh Lurah, dimana ia juga berkedudukan sebagai Kepala Adat. Dengan demikian Lurah tersebut selain melaksanakan pemerintahan desa ia juga fungsionaris adat. Jika melihat akan istilah Kepala Adat yang telah dikemukakan diatas, maka kedua daerah tersebut baik di Minangkabau maupun Jawa hampir tidak ada perbedaan antara Kepala Adat dengan Lurah, sebab keduanya mengepalai adat.

Kata Adat berasal dari bahasa Arab "*adah*" yang berarti kebiasaan yaitu sesuatu yang sering berulang. Adapun kebiasaan dalam arti adat ini sebenarnya kebiasaan yang normative dan telah mewujudkan aturan tingkah laku yang berlaku dalam masyarakat dan dipertahankan oleh masyarakat itu sendiri.

Dengan perpaduan arti istilah Kepala Adat dengan adat seperti dikemukakan di atas, maka Kepala Adat mempunyai pengertian adalah seorang pemimpin yang memimpin kebiasaan yang normative dan telah mewujudkan aturan tingkah laku yang berlaku dalam daerah atau wilayah hukum adat yang dipertahankan secara terus menerus.

2. Fungsi Kepala Pemerintahan Adat

Menurut Tanake (1981: 54) fungsi Kepala Pemerintahan Adat dalam masyarakat tidak jauh berbeda dengan fungsi hukum adat karena peran Kepala Pemerintahan Adat yang ada di dalam masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pedoman kepada anggota masyarakat, bilamana seharusnya bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat dan merupakan dasar dari tingkah laku tersebut adalah kebiasaan yang bersifat normative yaitu adat dan hukum adat.
- b. Menjaga keutuhan persekutuan dalam masyarakat, supaya persekutuan tersebut tetap terpelihara dan tidak dirusakkan oleh berbagai tindakan anggota masyarakat yang tidak sesuai dengan adat dan hukum adat
- c. Memberikan pegangan kepada anggota masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Pengendalian sosial tersebut lebih bersifat pengawasan terhadap tingkah laku masyarakat sehingga hidup persekutuan dapat dipertahankan dengan sebaik-baiknya.

- d. Memperhatikan setiap keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dalam hukum adat, sehingga keputusan tersebut mempunyai wibawa dan dapat memberikan kepastian hukum yang mengikat semua anggota masyarakat.
- e. Merupakan tempat bersandarnya anggota masyarakat untuk menyelesaikan, melindungi, menjamin ketentraman. Karena itu setiap ada persengketaan maka Kepala Adat adalah satu-satunya tempat anggota masyarakat bersandar untuk menyelesaikan masalahnya. Jika diselidiki peranan Kepala Adat dalam masyarakat memang banyak yang minta keterlibatan.

3. Pengertian Pemerintahan

Menurut Ermaya dalam Hamidi (2010: 138) menyebutkan bahwa, pemerintahan dapat dibedakan dalam pengertian luas dan sempit, pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan publik yang meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Dalam arti sempit, pemerintahan adalah segala kegiatan badan publik yang meliputi kekuasaan eksekutif.

Menurut Ndraha (1997: 6), pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok.

Dapat disimpulkan bahwa kepala pemerintahan adat adalah seseorang pemimpin yang memiliki hubungan antar anggota masyarakat yang telah mewujudkan aturan tingkah laku yang berlaku dalam daerah dan dipertahankan secara terus menerus sesuai dengan hukum adat yang berlaku.

D. Peranan Kepemimpinan Kepala Pemerintahan Adat

1. Peran Kepemimpinan

Menurut pendapat Stodgil dalam Sugiyono, (2006:58) ada beberapa peranan yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin, yaitu :

- a) Integration, yaitu tindakan-tindakan yang mengarah pada koordinasi.
- b) Communication, yaitu tindakan-tindakan yang mengarah pada meningkatnya saling pengertian dan penyebaran informasi.
- c) Product emphasis, yaitu tindakan-tindakan yang berorientasi pada volume pekerjaan yang dilakukan.
- d) Fronternization, yaitu tindakan-tindakan yang menjadikan pemimpin menjadi bagian dari kelompok.
- e) Organization, yaitu tindakan-tindakan yang mengarah pada perbedaan dan penyesuaian diri pada tugas-tugas.
- f) Evaluation, yaitu tindakan-tindakan yang berkenaan dengan pendistribusian ganjaran-ganjaran atau hukuman-hukuman.
- g) Initiation, yaitu tindakan yang menghasilkan perubahan-perubahan pada kegiatan organisasi.
- h) Domination, yaitu tindakan-tindakan yang menolak pemikiran-pemikiran seseorang atau anggota kelompoknya.

2. Peran Kepala Pemerintahan Adat

Peran Kepala Pemerintahan Adat dalam menjalankan tugasnya telah ditentukan oleh Majelis Penimbang Adat Lampung atau yang disebut dengan MPAL, sesuai Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 5 Tahun 2013, Bab IV bagian kedua pasal 6 yaitu :

- a) Menggali dan mengembangkan serta mempromosikan adat istiadat Lampung dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah Lampung guna memperkaya khasanah kebudayaan bangsa;
- b) Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dan berhubungan dengan adat istiadat Lampung;
- c) Menyelesaikan perselisihan atau perkara yang menyangkut atau yang berkaitan dengan adat istiadat antara anggota masyarakat adat sesama maupun dengan anggota masyarakat adat lainnya, termasuk harta kekayaan masyarakat adat yang bersangkutan;
- d) Menginventarisasi, mengamankan, memelihara, dan mengurus serta memanfaatkan sumber kekayaan yang dimiliki oleh Lembaga Adat Lampung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- e) Memberikan usulan atau saran dan masukan kepada pemerintah daerah dalam pembangunan di segala bidang, terutama pada bidang sosial kemasyarakatan dan budaya.

Peran Kepala Pemerintahan Adat menurut Patton (2005) dapat dilihat dari pelaksanaan tugas dan fungsinya. Fungsi Kepala Pemerintahan Adat dapat dilihat dalam pelaksanaan tugasnya yaitu :

1. Pembangunan Fisik

a. Perencanaan Pembangunan

Dalam pembangunan, perencanaan sangat perlu karena tanpa adanya suatu perencanaan pembangunan tidak dapat dilaksanakan begitu saja. B. Siswanto (2005: 45) mengatakan bahwa perencanaan adalah sebagai suatu yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan, dalam perencanaan pembangunan kepala adat sangat besar pengaruhnya, karena kepala adat adalah mediator pertama yang harus dilibatkan, tanpa adanya peran kepala adat program pembangunan tidak dapat berjalan.

b. Pelaksanaan Pembangunan

Salah satu peran Kepala Pemerintahan Adat pada pelaksanaan pembangunan atau gotong royong adalah menggerakkan masyarakat untuk bekerja sama dengan baik untuk mendorong semua masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Kepala Pemerintahan Adat berperan aktif demi kelancaran pelaksanaan dan untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan dan senantiasa memperhatikan kearifan lokal daerah setempat.

2. Pembangunan Non Fisik

a. Melestariakan nilai-nilai budaya

Melestarikan nilai budaya, dengan persepsi ini kita memperoleh lingkup permasalahan dan kriteria yang diperlukan untuk menilai gejala dan pengaruh teknologi dalam kehidupan masyarakat.

Kebudayaan dapat diartikan sebagai keseluruhan kompleks yang secara materil unsure-unsur universal yaitu teknologi dan mata pencaharian. Seluruh unsure yang disebut kebudayaan, secara formal merupakan ekspresi kehidupan manusia dengan kata lain kebudayaan dapat diartikan hasil kebudayaan dari generasi ke generasi. Oleh sebab itu harus mampu melestarikan nilai-nilai budaya yang masih ada agar tetap terjaga dari segala macam bentuk pengaruh.

b. Memberdayakan nilai-nilai adat dalam kehidupan masyarakat

Memberdayakan nilai-nilai adat dalam kehidupan sehari-hari merupakan suatu keharusan bagi masyarakat adat, karena adat istiadat merupakan aturan yang mengatur kehidupan sehari-hari dan bersifat mengikat bagi masyarakat adat. Seiring dengan berkembangnya pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), pengaruh adat dalam kehidupan masyarakat adat semakin berubah terutama pada masyarakat untuk selalu bergotong royong. Dalam bergotong royong masyarakat merasa rasa kebersamaan antar masyarakat semakin erat.

Menurut kitab Kuntara Khaja Niti, 10 Peran kepala pemerintahan Adat

yaitu:

1. Ulun Lmpung haruslah memiliki Lima Falsafah Hidup yaitu Piil Pusanggikhi, Juluq Adoq, Nemui Nyimah, Nengah Nyampokh, dan Sakai Sambayan.

2. Memelihara dan mengamalkan hukum adat
3. Menyelesaikan masalah kampung dari sengketa tanah, pencurian, perkawinan, perceraian, dll pelanggaran pidana dan perkara adat berdasarkan hukum adat.
4. Mengetahui, memahami, menerapkan hukum adat secara adil, tidak memandang status, asal usul, maupun materi.
5. Penyimbang adat dengan gelar adat yang disandang dalam Struktur Pemerintahan Adat, harus patuh dan menjunjung tinggi hukum adat (tidak kebal hukum)
6. Dalam menjalankan pemerintahan adat harus seiring sejalan dan bekerjasama dengan pemerintahan Negara.
7. (harus pandai) mengambil kebijakan dan keputusan yang adil terhadap segala masalah rumah tangga, hubungan antar tetangga, antar suku dan tiyuh dengan memperhatikan perlindungan hak-hak asasi masing-masing sesuai hukum adat yang berlaku.
8. Memelihara perdamaian yaitu kegiatan-kegiatan moral agar tidak terjadi konflik, menghubungkan, menyatukan, menyelaraskan kedudukan penyimbang-penyimbang dalam struktur adat, sehingga dapat kerja sama dan searah dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan adat.
9. Memimpin dan memutuskan perihal perkara/ sengketa, baik pidana adat maupun sengketa perseorangan (perdata adat) antara warga dan para pentimbang dalam batas wilayah hukum adat.
10. Memimpin musyawarah adat dalam menentukan/memutuskan tentang denda adat dan bentuk hukuman bagi warga dan penyimbang yang

secara sah terbukti melanggar hukum adat (ragam pelanggaran hukum adat diatur dalam pasal-pasal dan ayat-ayat hukum adat setempat)

3. Fungsi Kepemimpinan

Lima fungsi pokok kepemimpinan Menurut Rivai dan Mulyadi (2013: 34) yaitu :

a) Fungsi Intruksi

Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana, dan dimana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif

b) Fungsi Konsultasi

Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Pada tahap pertama dalam usaha menetapkan keputusan, pemimpin sering kali memerlukan bahan pertimbangan yang mengharuskan berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinya yang mempunyai berbagai bahan informasi dalam menetapkan keputusan. Tahap berikutnya konsultasi dari pimpinan pada orang-orang yang dipimpin dapat dilakukan setelah keputusan ditetapkan dan sedang dalam pelaksanaan

c) Fungsi Partisipasi

Dalam menjalankan fungsi ini pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya

d) Fungsi Delegasi

Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat/menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pimpinan

e) Fungsi Pengendalian

Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses/efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal.

4. Gaya Kepemimpinan

Menurut Rivai (2004: 122) ada tiga gaya kepemimpinan yang mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai, yaitu :

a) Gaya Kepemimpinan Otoriter

Kepemimpinan otoriter disebut juga kepemimpinan direktif atau dictator. Pemimpin memberikan intruksi kepada bawahan, menjelaskan apa yang harus dikerjakan, selanjutnya karyawan menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diperintahkan oleh atasan. Gaya kepemimpinan ini menggunakan metode pendekatan kekuasaan dalam mencapai keputusan dan pengembangan strukturnya, sehingga kekuasaanlah yang paling diuntungkan dalam organisasi.

Ciri-ciri Kepemimpinan Otoriter :

- 1) Wewenang mutlak terpusat pada pimpinan;
- 2) Keputusan dibuat oleh pimpinan;

- 3) Kebijakan selalu dibuat oleh pimpinan;
 - 4) Komunikasi berlangsung satu arah dari pimpinan ke bawahan;
 - 5) Pengawasan terhadap sikap tingkah laku, perbuatan atau kegiatan para bawahannya dilakukan secara ketat;
 - 6) Tiada kesempatan bagi bawahan untuk memberikan saran, pertimbangan, atau pendapat;
 - 7) Tugas-tugas dari bawahan diberikan secara instruktif;
 - 8) Tanggung jawab keberhasilan organisasi hanya dipikul oleh pimpinan.
- (Sutarto 2006: 73)

b) Gaya Kepemimpinan Demokratis

Gaya kepemimpinan ini ditandai oleh adanya suatu struktur yang pengembangannya menggunakan pendekatan pengambilan keputusan yang kooperatif. Dalam gaya kepemimpinan ini, ada kerja sama antara atasan dengan bawahan. Dibawah kepemimpinan demokratis bawahan cenderung bermoral tinggi, dapat bekerjasama, mengutamakan mutu kerja dan dapat mengarahkan diri sendiri.

Ciri-ciri Kepemimpinan Demokratis sebagai berikut :

- 1) Wewenang pemimpin tidak mutlak;
- 2) Keputusan dibuat bersama pimpinan dan bawahan;
- 3) Kebijakan dibuat bersama pimpinan dan bawahan;
- 4) Komunikasi berlangsung timbal balik, baik yang terjadi antara pimpinan dan bawahan maupun antar sesama bawahan;

- 5) Pengawasan terhadap sikap, tingkh laku, perbuatan atau kegiatan para bawahan dilakukan secara wajar;
- 6) Banyak kesempatan bagi bawahan untuk menyampaikan saran, pertimbangan, atau pendapat;
- 7) Tugas-tugas kepada bawahan diberikan dengan lebih bersifat permintaan dan pada instruksi;
- 8) Tanggung jawab keberhasilan organisasi dipikul bersama pimpinan dan bawhan. (Sutarto 2006: 75-76)

c) Gaya Kepemimpinan Bebas (*Laissez-Faire*)

Gaya kepemimpinana ini memberikan kakuasaan penuh pada bawahan, struktur organisasi bersifat longgar, pemimpin bersifat pasif. Peran utama pimpinan adalah menyediakan materi pendukung dan berpartisipasi jika diminta bawahan.

Ciri-ciri Kepemimpinan Bebas (*Laissez-Faire*) sebagai berikut :

- 1) Pemimpin melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada bawahan;
 - 2) Keputusan lebih banyak dibuat oleh para bawhan;
 - 3) Kebijaksann lebih banyak dibuat oleh para bawhan;
 - 4) Pimpinan hanya berkomunikasi apabil diperlukan oleh bawahan
 - 5) Hampir tiada pengawasan terhadap sikap, tingkh laku, perbuatan, atau kegiatan yang dilakukan para bawahan;
 - 6) Peranan pimpinan sangat sedikit dlam kegiatan kelompok;
 - 7) Kepentingan pribadi lebih utama dari kepentingan kelompok;
 - 8) Tanggung jawab keberhasilan organisasi dipikul orang perorrangan.
- (Sutarto 2006: 77-78)

E. Pelestarian Budaya Lampung Saibatin

1. Pengertian Pelestarian

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

Pengertian pelestarian atau konservasi, dari kata conservation, sebagai suatu upaya untuk mempertahankan tetapi sekaligus dapat menerima adanya perubahan. Pelestarian adalah upaya menjaga kesinambungan yang menerima perubahan atau pembangunan. Hal ini untuk tetap memelihara identitas dan sumber daya lingkungan dan mengembangkan beberapa aspeknya untuk memenuhi kebutuhan modern dan kualitas hidup yang lebih baik. Perubahan yang dimaksud bukanlah perubahan yang terjadi secara drastis, namun perubahan secara alami dan terseleksi. Kegiatan pelestarian ini bisa berbentuk pembangunan atau pengembangan dan melakukan upaya preservasi, restorasi, replikasi, rekonstruksi, revitalisasi, dan atau penggunaan untuk fungsi baru suatu asset masa lalu. Dan perlu ditekankan bahwa pelestarian merupakan upaya mengelola perubahan, untuk kemudian menciptakan pusaka masa mendatang.

Pelestarian merupakan upaya keseluruhan dalam rangka menjaga eksistensi suatu kebudayaan. Berdasarkan kalimat tersebut, maka yang dilestarikan adalah eksistensi kebudayaan tersebut dan bukan ungkapan-ungkapan yang

menyertainya. Dengan demikian upaya pelestarian menjadi suatu usaha yang dinamis.

Dalam pengertian pelestarian tercakup tiga rincian tindakan yaitu : perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Perlindungan kebudayaan merupakan segala upaya pencegahan dan penanggulangan gejala yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kemusnahan bagi manfaat dan keutuhan sistem gagasan, sistem perilaku, dan atau benda budaya akibat perbuatan manusia ataupun proses alam.

2. Pengertian Budaya

Menurut Soekanto (1996: 188), budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari kata buddhi (budi dan akal) kebudayaan itu sendiri diartikan sebagai hal-hal asing yang sama artinya dengan kebudayaan yang diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam.

Menurut Tubbs dan Moss (2001; 273), budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi. Budaya terbentuk dari berbagai unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat bahasa, perkakas, pakaian, bangunan dan karya seni.

Tubbs dan Moss (2001: 273), menjelaskan bahwa sebuah budaya dapat berubah dan berevolusi dari waktu ke waktu namun seperangkat karakteristik dimiliki bersama oleh sebuah kelompok secara keseluruhan dan dapat dilacak,

meskipun oleh berubah banyak dari generasi ke generasi. Kemudian budaya merupakan suatu pola hidup menyeluruh bersifat kompleks, abstrak dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar dan meliputi banyak dalam kegiatan sosial manusia.

Menurut pandangan Koentjaraningrat dalam Abdulkadir (2005: 75), kebudayaan paling sedikit memiliki 3 (tiga) wujud yaitu :

- a. Keseluruhan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya yang berfungsi mengatur, mengendalikan, dan memberi arah pada kelakuan dan perbuatan manusia dalam masyarakat yang disebut “adat tata” kelakuan
- b. Keseluruhan aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat, yang disebut “sistem sosial”. Sistem sosial terdiri dari rangkaian aktivitas manusia dalam masyarakat yang selalu mengikuti pola-pola tertentu berdasarkan adat tata kelakuan, misalnya gotong royong dan kerja sama
- c. Benda-benda hasil karya manusia yang disebut “kebudayaan fisik”, misalnya pabrik baja, candi Borobudur, pesawat udara, computer, atau kain batik.

3. Budaya Lampung Saibatin

Depdikbud (1990) menurut sejarahnya, orang Lampung berasal dari daerah (daerah Pegunungan Bukit Barisan sekitaran Krui). Kemudian orang Lampung melakukan perpindahan, dalam perpindahan tersebut rombongan pecah menjadi dua. Rombongan yang satu melewati bagian dalam daerah Lampung mereka dinamakan orang Lampung yang beradat Pepadun.

Sementara rombongan yang lain mengambil jalan menyusuri sepanjang daerah pantai Lampung, dinamakan beradat Saibatin.

Zulchilal B.C (1982) Saibatin sesungguhnya diartikan status yang ada dalam adat untuk membina kerukunan bermasyarakat yang mengikat hubungan persaudaraan, sehingga berkembang menjadi suatu kedudukan dengan adanya punyimbang Saibatin. Punyimbang Saibatin yang dimaksud yaitu istilah bagi pimpinan adat daerah Lampung Pesisir umumnya dan Daerah Buay Seputih pada khususnya.

Selanjutnya yang dimaksud dengan saibatin adalah yang memimpin dengan ciri-ciri:

- a. Martabat kedudukan adat tetapi, tidak ada upacara peralihan adat.
- b. Jenjang kedudukan Saibatin tanpa tahta pepadun.
- c. Bentuk perkawinan dengan jujukh dan samanda.
- d. Pengaruh islam sangat kuat.
- e. Kebanggaan keturunan hanya terbatas pada kerabat saibatin.

Menurut Masyarakat adat Lampung Saibatin yang mendiami wilayah adat yaitu Labuhan Maringgai, Pugung, Jabung, Way Jepara, Kalianda, Raja Basa, Teluk Betung, Padang Cermin, Cukuh Balak, Way Lima, Talang Padang, Kota Agung, Semka, Suoh, Sekincau, Batu Brak, Belalu, Liwa, Pesisir Krui, Ranau, Martapura, Muara Dua, Kayu Agung, empat kota ini ada di Provinsi Sumatera Selatan, Cikong di Pantai Banten dan bahkan Merpas di Selatan Bengkulu. Masyarakat adat Saibatin sering juga dinamakan Lampung Pesisir karena sebagian besar berdomisili di

sepanjang pantai Timur, Selatan dan Barat Lampung yang masing-masing terdiri dari :

- a. Paksi Pak Sekala Brak (Lampung Barat)
- b. Keratuan Melinting (Lampung Timur)
- c. Keratuan Daerah Putih (Lampung Selatan)
- d. Keratuan Semaka (Tnggamus)
- e. Keratuan Komerling (Provinsi Sumatera Selatan)
- f. Cikoneng Pak Pekon (Provinsi Banten)

Menurut Hilman Hadikusuma, masyarakat adat Lampung Saibatin tidak dapat meraih derajat yang lebih tinggi dengan cara upacara Cakak Pepadun. Walaupun orang-orang yang memiliki derajat tinggi senantiasa disebabkan oleh kematian dan kelahiran, namun derajat tertinggi dalam masyarakat (Gelar Punyimbang) merupakan suatu hak turun temurun. Punyimbang (Pun: yang dihormati, nyimbang: yang mewarisi) artinya orang yang dituakan karena ia pewaris mayor dalam keluarga kerabat atau kebuayan. Dengan adanya kepunyimbangan ini maka keluarga Lampung mulai dari satu keluarga rumah dituakan, tidak ada tempat pemustan keluarga, tidak ada yang mengatur atau tidak ada yang dituakan dalam masyarakat menyelesaikan peristiwa-peristiwa kekerabatan.

Menurut Syani (2013) Warga masyarakat adat Saibatin secara umum merupakan sejumlah kolektivitas sosial yang masing-masing memiliki aturan internal tersendiri. Secara cultural masyarakat adat Saibatin

merupakan kesatuan-kesatuan hidup yang diatur oleh peraturan-peraturan yang berasal dari norma-norma sosial dan hukum adat yang hidup berkembang dalam masyarakat bersangkutan. Eksistensi institusi perwatin adat merupakan wadah penimbang adat dalam setiap musyawarah, terutama mengenai urusan adat dan kemasyarakatan. Seorang penimbang adat mempunyai kewenangan secara internal dipatuhi sebagai norma hukum yang dapat mengatur dan melindungi stabilitas hubungan sosial antar warga, termasuk keserasian hubungan masyarakat dengan alam sekitar.

Struktur pada masyarakat hukum adat penimbang saibatin dikelompokkan pada masyarakat hukum adat bertingkat, karena masyarakat hukumnya terbagi kedalam beberapa masyarakat hukum lainnya. Maksudnya karena adanya beberapa masyarakat hukum bawahan yang tunduk pada suatu masyarakat hukum atasan. Pada suatu kelompok kekerabatan dipimpin oleh seorang penimbang yang mempunyai bawahan khaja, batin, khadin, dan minak.

Makna dari unsure Pi'il Pesenggiri menurut adat Lampung Saibatin di kutip dari Zulchilal B.C, sebagai berikut :

a. Pi'il Pesenggiri

Sebagai segala sesuatu menyangkut harga diri, perilaku yang perasa dan mudah tersinggung, disamping sikap yang menjaga dan menegakkan nama baik serta martabat secara pribadi maupun keluarga persaudaraan.

b. Sakai Sambayan

Mempunyai rasa gotong royong, saling membenatu serta bahu membahu.

c. Ngukhi Simah

Bermurah hati dan ramah kepada siapa saja baik berupa pemberian maupun tutur kata serta sopan santun yang menyatakan keterbukaan masyarakat Lampung.

d. Nengah Nyampokh

Dalam pergaulan, masyarakat Lampung mudah menyesuaikan diri kedalam keluarga lain.

e. Bujenong Buadok

Gelar, adoq, jenong adalah nilai-nilai besar kebanggaan masyarakat Lampung sebagai warisan adat yang turun temurun karena dengan panggilannya nama asli seseorang merupakan suatu penghinaan terutama bila sedang dilangsungkan pesta adat.

F. Benda-Benda Budaya (Artefak) Lamban Dalam Kebandaran Marga Balak

1. Pengertian Benda-Benda Budaya (Artefak)

Menurut Johnthorne (2014), benda-benda budaya (artefak) merupakan peninggalan benda-benda bersejarah yaitu semua benda yang dibuat atau dimodifikasi oleh manusia yang dapat dipindahkan. Contoh benda-benda budaya atau artefak adalah alat-alat batu, logam dan tulang, gerabah, prasasti lempeng dan kertas, senjata-senjata logam (anak panah, mata panah, dll), terracotta dan tanduk binatang. Barang bersejarah ini sangatlah

penting untuk diletakkan di museum sehingga semua orang dapat melihat dan mempelajarinya.

Artefak dalam arkeologi mengandung pengertian benda atau bahan alam yang jelas dibuat oleh tangan manusia atau jelas menampakkan adanya jejak-jejak buatan manusia padanya (bukan benda alamiah semata) melalui teknologi pengurangan maupun teknologi penambahan pada benda alam tersebut. Ciri penting dalam konsep artefak adalah bahwa benda ini dapat bergerak atau dapat dipindahkan oleh tangan manusia dengan mudah tanpa merusak atau menghancurkan bentuknya.

2. Benda-Benda Budaya Lamban Dalam

Arsitektur tradisional Lampung umumnya terdiri dari bangunan tempat tinggal disebut Lamban dan bangunan penyimpanan bahan makanan dan benda pusaka yang disebut Lamban Pamanohan. Arsitektur tradisional Lampung Saibatin dapat ditemukan di daerah Negeri Olok Gading, Teluk Betung Barat, Bandar Lampung yaitu Lamban Dalam Kebandaran Marga Balak Lampung Pesisir. Bangunan ini berbahan kayu dan di depan rumah berdiri plang nama bertuliskan “Lamban Daalom Kebandaran Marga Balak Lampung Pesisir (Saibatin)”. Bentuknya sangat unik khas dengan siger besar berdiri megah diatas bangunan bagian muka. Sampai sekarang lamban ini ditempati kepala adat Marga Balak secara turun-temurun.

Meskipun berada di perkotaan, fungsi rumah panggung tidak begitu saja hilang. Lamban Dalam kebandaran Marga Balak berfungsi sebagai tempat rapat, musyawarah, begawi, dan acara-acara adat lain. Di Lamban Dalam

ini terdapat benda-benda budaya atau artefak seperti siger yang berusia ratusan tahun, konon sudah ada sebelum Gunung Krakatau meletus. Siger yang terbuat dari bahan perak ini adalah milik kepala adat dan diwariskan secara turun temurun. Siger ini hanyalah salah satu artefak atau peninggalan budaya yang sudah ratusan tahun usianya disimpan oleh Marga Balak. Selain siger ada juga keris, pedang, payan (tombak), kain sarat (kain khas Lampung Pesisir seperti tapis), lidah setan milik kepala marga serta pedang Ngusikh Bajau (pedang pengusir bajak laut), terbangun (alat musik pukul seperti rebana), dan tala (sejenis alat musik khas Lampung sejenis kulintang) dan salah satunya dinamakan Talo Balak .

3. Lamban Dalam Kebandaran Marga Balak

Rumaha Adat Lampung umumnya terdiri dari bangunan tempat tinggal disebut Lamban. Lambahana atau Nuwou, bangunan ibadah yang disebut Mesjid, Mesigit, Surau, Rang Ngaji, atau Pak Ngajei, bangunan musyawarah yang disebut sesat atau bataian, dan bangunan penyimpanan bahan makanan dan benda pusaka yang disebut Lamban Pamanohan. Salah satu Arsitek tradisional Lmapung dapat ditemukan di daerah Negeri OlokGading Teluk betung Barat, Bandar Lampung Negeri Olok Gading ini termasuk Lampung Pesisir Saibatin.

Begitu memasuki OlokGading kita akan menjumpai jajaran rumah panggung khas Lampung Pesisir dan disanalah kita akan melihat Lamban Dalam Kebandaran Marga Balak yang menjadi pusat adat istiadat Marga

Balak Olok Gading. Banguna ini berbahan kayu dan didepan rumah berdiri plang nama bertuliskan “Lamban Dalam Kebandaran Marga Balak Lampung Pesisir”. Bentuknya sangat unik dank has dengan siger besar berdiri megah diatas bangunan bagian muka. Sampai sekarang Lamban Dalam ini ditempti kepala adat Marga Balak secara turun temurun. Meskipun berada di perkotaan, fungsi rumah panggung tidak begitu saja hilang. Lamban Dalam Kebandaran Marga Balak berfungsi sebagai tempat rapat, musyawarah, begawi, dan acara –acra adat lain.

G. Kerangka Pikir

Kepala Pemerintahan Adat adalah seseorang pemimpin yang memiliki hubungan antar anggota masyarakat yang telah mewujudkan aturan tingkah laku yang berlaku dalam daerah dan diperthankan secara terus menerus sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Menurut Patton (2005) Kepala Pemerintahan Adat memiliki peran yaitu :

1. Pembangunan Fisik

a. Perencanaan Pembangunan

Dalam pembangunan, perencanaan sangat perlu karena tanpa adanya suatu perencanaan pembangunan tidak dapat dilaksanakan begitu saja. B. Siswanto 92005: 45) mengatakan bahwa perencanaan adalah sebagai suatu yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan, dalam perencanaan pembangunan kepala adat sangat besar pengaruhnya, karena kepala adat adalah mediator pertama yang harus dilibatkan, tanpa adanya peran kepala adat program pembangunan tidak dapat berjalan.

b. Pelaksanaan Pembangunan

Salah satu peran Kepala Pemerintahan Adat pada pelaksanaan pembangunan atau gotong royong adalah menggerakkan masyarakat untuk bekerja sama dengan baik untuk mendorong semua masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Kepala Pemerintahan Adat berperan aktif demi kelancaran pelaksanaan dan untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan dan senantiasa memperhatikan kearifan lokal daerah setempat.

2. Pembangunan Non Fisik

a. Melestariakan nilai-nilai budaya

Melestarikan nilai budaya, dengan persepsi ini kita memperoleh lingkup permasalahan dan kriteria yang diperlukan untuk menilai gejala dan pengaruh teknologi dalam kehidupan masyarakat. Kebudayaan dapat diartikan sebagai keseluruhan kompleks yang secara material unsure-unsur universal yaitu teknologi dan mata pencaharian. Seluruh unsure yang disebut kebudayaan, secara formal merupakan ekspresi kehidupan manusia dengan kata lain kebudayaan dapat diartikan hasil kebudayaan dari generasi ke generasi. Oleh sebab itu harus mampu melestarikan nilai-nilai budaya yang masih ada agar tetap terjaga dari segala macam bentuk pengaruh.

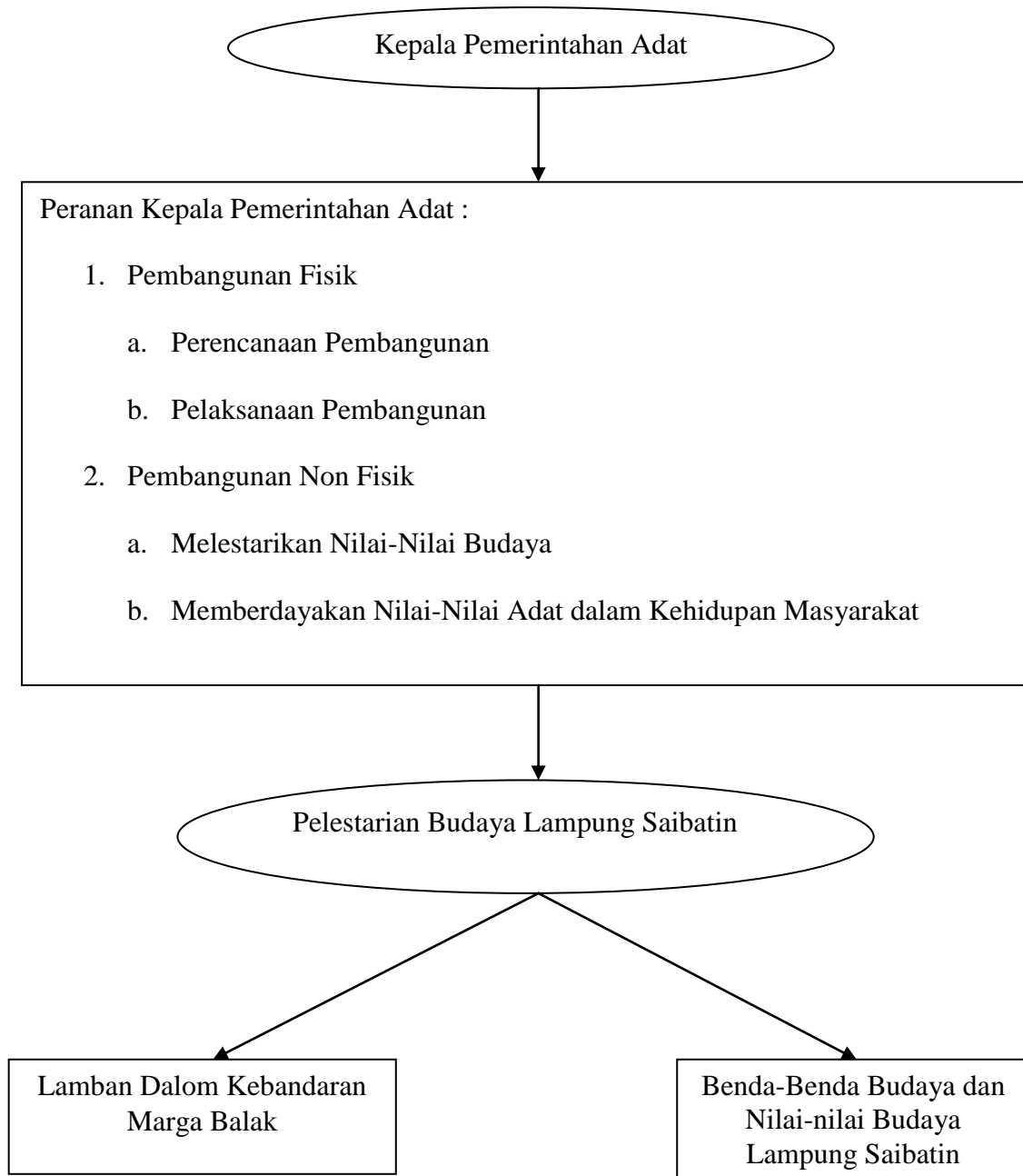
b. Memberdayakan nilai-nilai adat dalam kehidupan masyarakat

Memberdayakan nilai-nilai adat dalam kehidupan sehari-hari merupakan suatu keharusan bagi masyarakat adat, karena adat istiadat merupakan

aturan yang mengatur kehidupan sehari-hari dan bersifat mengikat bagi masyarakat adat. Seiring dengan berkembangnya pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), pengaruh adat dalam kehidupan masyarakat adat semakin berubah terutama pada masyarakat untuk selalu bergotong royong. Dalam bergotong royong masyarakat merasa rasa kebersamaan antar masyarakat semakin erat.

Pelestarian Budaya Lampung Saibatin adalah upaya dinamis yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok dan diwariskan dari generasi untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Pelestarian budaya Lampung Saibatin yaitu terdiri dari Lamban Dalam Kebandaran Marga Balak dan benda-benda budaya beserta Nilai-nilai Budaya Lampung Saibatin, dengan pelestarian tersebut Lamban Dalam Kebandaran Marga Balak dapat dipakai lagi sebagai pusat kegiatan kebudayaan Lampung seperti sebagai tempat rapat, musyawarah, begawi, dan acara-acara adat lain. Selain itu, menjaga barang-barang dan alat-alat ciri khas budaya Lampung Saibatin yang ada di dalam Lamban Dalam tersebut agar Lamban Dalam nantinya menjadi tempat wisata budaya dan menjadi tuan rumah di Provinsinya sendiri khususnya di Kelurahan Negeri Olok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat digambarkan kerangka pikir sebagai berikut ini



Gambar 2.4 Kerangka Pikir